

KOLABORASI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DESA SUKAMAJU DALAM PENGEMBANGAN WISATA BUKIT SAMPALAN ASRI BERBASIS *COMMUNITY BASED TOURISM*

Irfan Nursetiawan^{1*}, Budi Supriyanto²

¹ Universitas Galuh, Ciamis, Indonesia.

² Universitas Satyagama, Jakarta, Indonesia.

*Korespondensi: irfan.nursetiawan@gmail.com

ABSTRAK

Pengembangan potensi dan daya tarik objek wisata di tingkat daerah merupakan salah satu langkah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di perdesaan. Kurangnya aksesibilitas jalan dan teknologi menjadi salah satu penghambat dalam pengembangan objek wisata di Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kolaborasi pemerintah dan masyarakat desa dalam pengembangan Bukit Sampalan Asri (BSA) yang berada di wilayah Desa Sukamaju. Metode yang digunakan dalam penelitian ini, yakni metode penelitian kualitatif. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan: (1) tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi dalam pengembangan objek wisata; (2) fasilitas objek wisata cukup lengkap; (3) dukungan dari pemerintah desa dalam pengembangan objek wisata cukup baik; dan (4) tingkat jumlah kunjungan wisatawan lokal cukup tinggi.

Kata Kunci: pariwisata, kolaborasi pemerintah, masyarakat desa, community based tourism

ABSTRACT

Development of the potential and attractiveness of tourist objects at the regional level is one of the steps in efforts to increase the welfare of people in rural areas. Lack of road accessibility and technology is one of the obstacles in the development of tourist objects in Sukamaju Village, Cihaurbeuti District, Ciamis Regency. This study aims to find out how the government and village community collaborate in the development of Sampalan Asri Hill (BSA) in the Sukamaju Village area. The method used in this study is a qualitative research method. The results in this study indicate: (1) the level of community participation is quite high in the development of tourist objects; (2) tourist attraction facilities are quite complete; (3) the support from the village government in developing tourism objects is quite good; and (4) the level of the number of visits by local tourists is quite high.

Keywords: tourism, government collaboration, village community, community based tourism

A. PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat perdesaan tetap menjadi salah satu prioritas dalam

pola pembangunan yang berkelanjutan. Potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang berada di perdesaan dapat ditransformasi

menjadi suatu potensi ekonomi untuk menjembatani peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Potensi Sumber Daya Alam (SDA) di perdesaan seyogyanya dapat menjadi lumbung peningkatan ekonomi berbasis masyarakat. Salah satu yang dapat diinisiasi, yakni berkaitan dengan pengembangan objek wisata. Pariwisata di Indonesia memang telah berkembang cukup pesat, pada tahun 2020 jumlah usaha atau perusahaan Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) komersil sebagai berikut:



Gambar. 1 Jumlah Objek Daya Tarik Wisata (ODTW) Tahun 2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021.

Berdasarkan gambar.1 menunjukkan jumlah: (1) Daya Tarik Wisata Buatan 1003; (2) Daya Tarik Wisata Alam 651; (3) Wisata Tirta 530; (4) Daya Tarik Wisata Budaya 236; (5) Kawasan Pariwisata 92; dan (6) Taman Hiburan dan Rekreasi 40. Peluang dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat desa melalui pariwisata masih terbuka (Badan Pusat Statistik, 2022).

Potensi wisata desa harus didukung oleh berbagai sektor. Pengembangan pariwisata pedesaan memerlukan integrasi dari berbagai faktor, yang meliputi unsur pemerintah, masyarakat, wisatawan, operator pariwisata, dan akademisi (Asmoro et al., 2020). Secara komprehensif berdampak pada signifikansi pengembangan potensi wisata menjadi potensi ekonomi bagi masyarakat desa.

Potensi wisata desa dapat pula secara tidak langsung mengenalkan adat istiadat dan budaya yang mendorong ke arah pembangunan Nasional (Ani et al., 2013). Kearifan lokal di wilayah perdesaan selain menyimpan nilai-nilai etika dan estetika juga merupakan potensi lokal yang dapat berkontribusi dalam pengembangan potensi wisata desa.

Keanekaragaman hayati memberikan warna dalam penentuan potensi wisata desa dan adat istiadat masyarakat desa menjadi sumber keragaman budaya. Daya dukung lain dalam pariwisata, yakni *food and beverage service* (Prayogi, 2017). Potensi sumber pangan lokal yang dikembangkan oleh Pemerintah Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis diantaranya: (1) kopi robusta dan arabika; (2) padi; (3) ikan konsumsi; (4) teh; (5) gula aren.

Komoditas pangan lokal yang ada di Desa Sukamaju beberapa telah menjadi salah satu buah tangan bagi para pengunjung yang datang ke objek wisata Bukit Sampalan Asri (BSA). Keindahan panorama alam di objek wisata BSA dapat dinikmati oleh para pengunjung dari mulai pagi sampai dengan sore hari.

Pada malam hari para wisatawan dapat berkemah dan menikmati makanan lokal. Hanya untuk kemasan makanan lokal

belum memenuhi target dari pasar pariwisata. Desain kemasan sebaiknya dapat menampilkan atribut unik dari sebuah produk (Erlyana, 2018). Kemasan makanan lokal dapat merepresentasikan produk unggulan desa. Hanya dalam hal kemasan makanan tradisional dari Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan target *market* dalam mendongkrak pengembangan potensi wisata di wilayah perdesaan.

Aksesibilitas jalan ke objek wisata tersebut dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua maupun roda empat. Aksesibilitas tersebut dapat menunjang pengembangan potensi wisata. Pengelolaan potensi wisata yang berkelanjutan merupakan tujuan utama dalam pengembangan objek wisata.

Objek wisata Bukit Sampalan Asri (BSA) dikelola oleh kelompok masyarakat. Hal ini sesuai dengan perkembangan wisata konvensional ke arah yang lebih modern. Perubahan ini dari bentuk pariwisata yang dikelola massa ke bentuk pariwisata yang dikelola individu dan kelompok kecil, dari wisata bersifat konvensional menjadi wisata minat khusus (Kusuma & Salindri, 2022).

Pengelolaan Bukit Sampalan Asri (BSA) sudah cukup baik, hanya terdapat beberapa indikator permasalahan sebagai berikut: (1) latar belakang pendidikan pengelola objek wisata Bukit Sampalan Asri (BSA) terbilang cukup rendah; (2) aksesibilitas teknologi informasi dalam promosi masih bersifat konvensional; (3) anggaran dalam pengembangan objek wisata masih rendah; dan (4) pola pengelolaan objek wisata masih bersifat konvensional dan atau tradisional yang belum bersifat dinamis adaptif terhadap IT.

B. METODE PENELITIAN

1. *Collaborative Governance*

Keterlibatan pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah desa dalam pengembangan potensi kewilayahan merupakan bentuk kerja sama untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perdesaan. Keadaan geografis, topografi dan luas wilayah mempengaruhi ruang, serta aktivitas masyarakat perdesaan.

Di era digitalisasi dan era *Information and Technology* (IT) pada saat ini, aksesibilitas teknologi informasi sangat diperlukan. Aksesibilitas melalui pemanfaatan teknologi informasi dapat dimanfaatkan oleh *khalayak ramai* untuk akses informasi terhadap aturan-aturan adat yang berlaku ketika ingin melakukan eksplorasi terhadap potensi wisata yang ada di desa (Nirmala Bagus et al., 2020).

Salah satu bentuk kerja sama yang dilakukan antar instansi maupun kelompok masyarakat, yakni *collaborative governance*. *Collaborative governance* adalah proses dan struktur yang melibatkan berbagai pihak melintasi batas-batas organisasinya (Luh & Dewi, 2019). *Collaborative governance* merepresentasikan dan memproyeksikan gotong royong dalam menyelesaikan suatu masalah melalui kerja sama antar pemerintah, kerja sama antar pemerintah dengan swasta, dan kerja sama pemerintah dengan pihak lain yang relevan.

Proses kerja sama yang terjalin dalam hal ini pula ada istilah *pentahelix*. Menurut Carayannis & Campbell (Ibrahim & Nugrahani, 2021) menyatakan *pentahelix* terdiri dari: (a) akademisi; (b) bisnis; (c) pemerintah; (d) media; dan (e) lingkungan. Sinergitas yang terjalin tentunya diharapkan

dapat mengembangkan potensi objek wisata di wilayah perdesaan. Akademisi berperan sebagai *agent of education* dan penelaah dalam mengembangkan pariwisata di perdesaan. Pariwisata adalah salah satu industri yang kompleks, dimana pariwisata meliputi multi dimensi, multi disiplin multi level kordinasi, multi sektor, multi *stakeholders*, *multi layer partnership* (Stefanus Purba & Setiawan, 2022). Artinya di sektor pariwisata memerlukan kolaborasi antar *stakeholders* untuk membangun ekosistem pembangunan pariwisata yang berkelanjutan.

Keberlanjutan dalam bentuk kerja sama sangat diperlukan untuk peningkatan profesionalisme pengelolaan bidang pariwisata. Keterlibatan dan kontribusi dari semua kepentingan, baik dari sektor swasta maupun publik merupakan bentuk konstruksi dari kerja sama yang berlandaskan asas gotong royong.

Terdapat beberapa faktor dalam terjalannya kerja sama antara para *stakeholders*. Salah satunya berkaitan dengan kurangnya sumber daya dalam pengelolaan suatu objek wisata. Peran akademisi dalam konsep Penta Helix sejatinya lebih mengarah pada pendampingan kepada pemerintah desa dan masyarakat terutama dalam hal penelitian (Winarno et al., 2021). Kontribusi tersebut sangat diperlukan dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia di perdesaan.

Hasil penelitian dari akademisi juga dapat dimanfaatkan sebagai landasan arah pengembangan dari pariwisata. Begitu pula sektor swasta yang dapat membantu dalam arah pengembangan bisnis pariwisata. Sektor swasta merupakan pelaku dalam pengembangan bisnis (Mariam et al., 2022).

Keberlanjutan objek wisata tidak terlepas dari sektor bisnis sebagai bagian dari potensi ekonomi. Tetapi, kesejahteraan masyarakat desa tetap harus menjadi prioritas dari pengelola objek wisata.

Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Desa sebagai *leading sector* dalam pola pengendalian dan pengembangan objek wisata yang berkelanjutan, serta tetap menjaga lingkungan sekitar merupakan peran pokok untuk mencapai pengelolaan objek wisata yang berdaya saing. Selaras dengan pendapat Alonso (Destiana & Yuningsih, 2020) menyatakan pengembangan pariwisata yang berkelanjutan erat hubungannya dengan keterlibatan *stakeholders*. Pemangku kepentingan berperan sebagai pengarah dan pemberi saran dalam kerangka kebijakan yang mendukung pengembangan destinasi wisata.

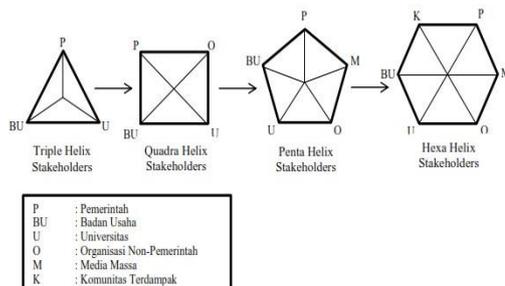
Pengembangan dan pembangunan pariwisata seyogyanya untuk kepentingan publik dan kesejahteraan masyarakat. Media merupakan bagian terpenting di sektor pariwisata sebagai unsur yang mempromosikan destinasi wisata. Media berfungsi sebagai pemberi informasi, pendidikan, penghibur, dan sebagai pengontrol sosial (Adiwilaga & Salsabila, 2022). Sebagai pemberi informasi, media yang bersifat *online* maupun *offline* akan memberikan informasi yang valid berkaitan dengan lokasi destinasi wisata, fasilitas maupun berkaitan dengan Harga Tiket Masuk (HTM).

Media pula turut serta dalam mengedukasi calon wisatawan atau pengunjung dan wisatawan yang datang ke suatu destinasi wisata agar dapat menjaga lingkungan secara arif, serta bijak. Media

massa dapat menciptakan citra positif bagi destinasi wisata (Rahmat Muhammad et al., 2023). Kerja sama antara pengelola objek wisata dengan media massa dapat menjadi sinergi dalam menciptakan iklim industri pariwisata ke arah yang lebih maju. Media massa yang beragam tentunya dapat dipilih pihak pengelola untuk menjadikan tempat wisata lebih terkenal dan dapat dikunjungi oleh para wisatawan dengan mudah.

Aksesibilitas internet yang saat ini banyak dimanfaatkan oleh pegiat pariwisata dan lingkungan, tentunya dapat pula dimanfaatkan sebagai media promosi yang cukup efektif. Pengembangan pariwisata bukan hanya terfokus pada pengembangan kawasan, tetapi sarana dan prasarana juga perlu diperhatikan (Suroija et al., 2022). Daya Tarik wisata juga unsur yang sangat penting untuk dikembangkan oleh pengelola objek wisata.

Konsep *pentahelix* tentunya hanya salah satu dalam peningkatan pengembangan kapasitas dan kapabilitas dalam pengelolaan pariwisata yang berkelanjutan. Adapun unsur dari *pentahelix* dapat digambarkan, sebagai berikut:



Gambar.1 Penta Helix Stakeholders

Sumber: bencanapedia.id, 2020.

Berdasarkan gambar tersebut maka pentahelix terdiri dari 5 (lima) unsur yang menjadi bagian dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dan atau program pengembangan sesuatu yang melibatkan *khalayak ramai*. Hal itu dimungkinkan agar terjalinnya kerja sama dalam penyelesaian permasalahan yang muncul. Begitu pula dalam pengelolaan pariwisata yang bersifat *sustainable* (berkelanjutan). Pada dasarnya konsep *pentahelix* bertujuan untuk memberikan nilai bagi masyarakat dan lingkungan (Septiadiani, 2022).

Prespektif nilai dalam *pentahelix* dapat berupa nilai positif untuk mencapai kesejahteraan dan kelestarian lingkungan. Nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan sampai saat ini masih terjaga dan akan menjadi pondasi dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata. Salah satu nilai yang saat ini masih dijaga berkaitan dengan interaksi sosial masyarakat perdesaan yang menjunjung tinggi persaudaraan dan gotong royong.

Kearifan lokal sebagai salah satu ciri dari masyarakat desa merupakan khasanah sosial budaya yang unik dan merupakan bagian yang menopang keseimbangan kehidupan bermasyarakat. Disadari atau tidak bahwa eksistensi destinasi wisata tidak terlepas dari adanya peran aktor *pentahelix* dalam pembangunan pariwisata pedesaan (Pugra et al., 2021). Artinya seluruh aktor berkontribusi dalam banyak hal terutama untuk pengembangan pariwisata. Dalam pengembangannya, eksistensi destinasi wisata dapat pula memberdayakan masyarakat lokal.

Kegiatan di lokasi destinasi wisata dapat menjadikan masyarakat lokal lebih

sejahtera dan dapat pula mengembangkan potensi yang tersimpan untuk kemajuan ekonomi perdesaan. Menurut Imas (Ummul et al., 2022) menyatakan Model *pentahelix* menjadi acuan untuk mengembangkan sinergi antar pihak yang bersangkutan dalam membantu dan mendukung tujuan sebaik mungkin. Hal ini menjadi dasar dalam kerja sama yang dilakukan oleh seluruh kelembagaan untuk menjadikan seluruh program dapat memberikan nilai kebermanfaat dan kemajuan di berbagai bidang. Kesejahteraan merupakan kunci dalam pemberdayaan masyarakat.

2. Pariwisata

Industri pariwisata tetap menjadi primadona dalam menghasilkan roda perekonomian masyarakat. Dalam paradigma perekonomian, pariwisata dapat menjadi nilai tambah bagi perekonomian suatu daerah daya tarik wisata dengan keragaman kuliner, cinderamata ciri khas dari daerah tersebut (Diana et al., 2017). Kegiatan pariwisata dapat menyerap lapangan kerja dan berkontribusi dalam pembangunan.

Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi salah satu faktor yang berkontribusi dalam pengembangan pariwisata di daerah maupun di perdesaan. Hal itu dapat dilakukan melalui meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia sebagai pelaku kebijakan dalam bidang kepariwisataan melalui jenjang pendidikan yang bersifat formal maupun non formal (Ika et al., 2016).

Sumber Daya Manusia (SDM) dapat menjadi prioritas utama selain sarana dan prasarana destinasi wisata. Pariwisata merupakan kegiatan masyarakat untuk

mengisi hari libur (Firliana et al., 2016). Oleh karena itu kegiatan pariwisata merupakan bagian dari aktivitas masyarakat untuk berekreasi baik secara individu maupun kelompok.

Pariwisata merupakan peluang bagi Pemerintah, pihak swasta maupun *stakeholders* yang lain untuk dijadikan sumber perekonomian di wilayah perdesaan. Banyak bermunculan destinasi wisata baru, baik itu wisata alam maupun wisata buatan yang memang lokasinya ada di perdesaan. Adanya mobilitas para wisatawan menjadikan kegiatan pariwisata tidak pernah sepi di beberapa objek wisata, khususnya bagi masyarakat urban kegiatan berwisata ke wilayah perdesaan menjadi pilihan alternatif dalam mengisi liburan.

3. Desa Wisata

Inovasi dan perkembangan wilayah perdesaan menjadi hal yang menarik untuk disimak, serta dikembangkan untuk berkehidupan yang lebih sejahtera. Pemerintah Desa banyak berbenah dalam hal tata kelola dan pengembangan potensi ekonomi, khususnya bidang pariwisata.

Menurut Yoeti, Oka (Zakaria & Suprihardjo, 2014) menyatakan, bahwa Desa wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Oleh karena itu, desa wisata merupakan suatu wilayah perdesaan yang menawarkan originalitas baik dari segi sosial budaya, adat-istiadat, keseharian, arsitektur tradisional, serta struktur tata ruang desa.

Tata ruang desa banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor geografis maupun monografi desa. Arsitektur tradisional sebagai bagian dari kearifan lokal merupakan ciri identitas desa sebagai

ruang lingkup sosial budaya yang diturunkan secara turun temurun. Budaya yang timbul di masyarakat merupakan bentuk adaptasi dengan lingkungannya (Siswanto, 2009). Hal itu berkorelasi dengan daya dukung lingkungan dan dibuktikan bentuk ekspresi masyarakat desa melalui bahasa, tulisan, benda, bahkan berupa karya seni.

Tata ruang desa yang baik akan menjadikan ruang gerak masyarakat akan lebih adaptif untuk melakukan interaksi antar individu. Bahkan pengelolaan yang baik akan meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat desa. Artinya perlu dilakukan perbaikan dan peningkatan kondisi sarana dan prasarana sebagai pendukung aktivitas masyarakat, pengelolaan kawasan lindung serta kawasan budidaya dan penatagunaan tanah (Angreglita et al., 2022).

Pola konservasi lingkungan merupakan bagian terpenting dari tata ruang desa. Tata ruang desa juga harus memperhatikan konservasi lingkungan. Dampak yang signifikan, yakni terjaga kelestarian lingkungan akan berdampak positif. Tujuan dari penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang kehidupan yang nyaman, produktif, dan berkelanjutan (Azizi & Salim, 2021).

Berdasarkan hal tersebut, produktivitas desa ditentukan oleh pula tingkat kenyamanan ruang kehidupan masyarakat desa. Menurut (Zamhari, 2017) menyatakan, bahwa terdapat 3 (tiga) unsur desa-desa adalah daerah, penduduk, dan tata kehidupan. Daerah diinterpretasikan sebagai wilayah dan batas kewilayahan. Penduduk merupakan bagian dari ruang kehidupan masyarakat perdesaan dan tata kehidupan merupakan bagian dari aturan berkehidupan bermasyarakat.

Wilayah perdesaan memiliki lingkungan fisik yang relatif masih asli atau belum banyak tercemar oleh berbagai jenis polusi dibandingkan dengan kawasan perkotaan (Istiyanti, 2020). Kawasan perdesaan yang masih belum banyak tercemar akan berdampak pada daya dukung lingkungan. Keanekaragaman hayati dan *pluralisme* budaya perdesaan akan membentuk tata sosial budaya yang arif dalam memanfaatkan potensi alam.

Ruang yang diciptakan oleh manusia akibat dari adanya aktivitas dan perilaku yang terjadi baik yang memiliki batasan yang jelas secara fisik ataupun tidak (Rhosha Fajari et al., 2014). Artinya kaidah normatif dan etika dalam berkehidupan tetap dijunjung tinggi oleh masyarakat perdesaan. Dampak yang konstruktif dan berwawasan kearifan lokal bermakna keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

4. *Community Based Tourism*

Kemajuan dan perkembangan industrialisasi dalam bidang pariwisata tidak terlepas dari partisipasi masyarakat yang mendorong terbentuknya destinasi wisata. Perkembangan dunia pariwisata berkorelasi dengan pengembangan *Community Based Tourism* (CBT). Menurut Rest (Bandaso Tandilino et al., 2020) menyatakan, bahwa pengembangan *Community Based Tourism* (CBT) terdiri dari: (a) dimensi ekonomi; (b) dimensi sosial; (c) dimensi budaya; (d) dimensi lingkungan; dan (e) dimensi politik. Keseluruhan dimensi tersebut berperan untuk berkontribusi dalam pengembangan CBT dalam pengelolaan destinasi wisata.

Ada beberapa faktor pula yang dapat menjadi indikator dalam evaluasi

penerapan dari *Community Based Tourism* (CBT). Dalam penerapannya semakin tinggi partisipasi masyarakat maka semakin tinggi pula dampaknya terhadap masyarakat (Diana & Budi Setiawan, 2021). Tingkat sosial-ekonomi masyarakat desa akan meningkat sejalan dengan keaktifan, serta tingginya partisipasi dan kontribusi masyarakat terhadap pengembangan pariwisata berbasis *Community Based Tourism* (CBT).

Implementasi dari *Community Based Tourism* (CBT) tentunya harus memperhatikan aspek perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program. Sejalan dengan pendapat Suansri (Febrian & Suresti, 2020) menyatakan, bahwa *community-based tourism* sebagai pariwisata yang memperhitungkan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial dan budaya. Aspek keberlanjutan sebagai hal yang menjadi urgensi dalam penerapan *community-based tourism*.

Inisiasi masyarakat dalam membuat destinasi wisata baru, tentunya harus tetap ada *agent of control* dalam pengembangan destinasi wisata tersebut. Karena dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari dimensi-dimensi dalam kolaborasi antara pihak swasta, pemerintah, media dan akademisi. Adapun yang menjadi ikon atau subjek pendorong pariwisata, yakni masyarakat lokal sebagai bagian dari subjek *community based tourism* (Triristina et al., 2022).

Masyarakat lokal mempunyai peran utama dalam implementasi *Community Based Tourism* (CBT) dan hal ini disebabkan pariwisata yang dibangun dapat dikatakan berasal dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Sehingga, kesejahteraan dari hasil pengelolaan digunakan untuk masyarakat.

Implementasi dari *community based tourism* dapat dilihat dari klusterisasi desa wisata. Desa wisata dikelompokkan menjadi 3 (tiga), yaitu: (a) desa wisata embrio; (b) desa wisata berkembang; dan (c) desa wisata maju (Syarifah & Rochani, 2021). Penerapan *community based tourism* dapat pula ditinjau dari kesiapan masyarakat dalam upaya inisiasi pembentukan beberapa destinasi wisata di wilayah satu desa tertentu.

Community Based Tourism (CBT) memberikan peluang bagi masyarakat lokal untuk menjadi poros utama dalam pengembangan pariwisata melalui pelibatan dari mulai perencanaan hingga operasional dengan tujuan utama untuk menciptakan industri yang berkelanjutan (Singgih Anandito & Bakti Setiawan, 2018).

Karena industri pariwisata yang berkelanjutan akan membutuhkan perencanaan yang matang. Jikalau organisasi lokal masyarakat desa turut berperan penting dalam mewujudkan keberlanjutan desa wisata (Yulianto et al., 2022). Sehingga dalam mewujudkan penerapan *community-based tourism* yang berkelanjutan dapat dipersiapkan dimulai dari tahap perencanaan dan evaluasi dari setiap pengembangan yang dilakukan.

Dalam penelitian yang telah dilaksanakan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif terdiri dari: (1) menganalisis; (2) menggambarkan; dan (3) meringkas berbagai informasi dari hasil wawancara (Lindawati & Hendri, 2016). Dalam penelitian ini akan dihasilkan sebuah gambaran berkaitan dengan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan wisata Bukit Sampalan Asri

berlandaskan implementasi *community based tourism* di Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kolaborasi Pengembangan Destinasi Wisata

Objek wisata Bukit Sampalan Asri (BSA) merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis. Objek wisata tersebut dikelola dengan baik oleh pengelola destinasi yang berasal dari kelompok masyarakat.

Harga tiket masuk ke lokasi tersebut cukup terjangkau dan aksesibilitas menuju ke destinasi dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor. Pihak Pemerintah Desa Sukamaju terkonfirmasi pula memberikan dukungan untuk pengembangan destinasi tersebut.

Dalam pengembangan destinasi pariwisata hal yang terpenting adalah keterlibatan masyarakat (Rusyidi & Fedryansah, 2018). Masyarakat dalam hal ini menjadi *community development* yang terfokus pada pengembangan destinasi wisata dan peningkatan ekonomi masyarakat di perdesaan.

Kolaborasi tersebut terjalin dengan landasan pemberdayaan masyarakat desa oleh pihak pemerintah desa dan masyarakat desa yang membutuhkan aksesibilitas jejaring pengembangan destinasi wisata. Pihak akademisi pula telah masuk dan menelaah berkaitan dengan penerapan *community based tourism*, khususnya di objek wisata Bukit Sampalan Asri (BSA).

Potensi desa yang begitu berlimpah merupakan modal utama dalam mengembangkan potensi desa yang bernilai ekonomi maupun dalam peningkatan

produktivitas masyarakatnya. Paradigma masyarakat yang telah berkembang, menjadikan objek wisata Bukit Sampalan Asri berkembang secara bertahap.

Pariwisata bisa menjadi sarana untuk menambah ilmu, silaturahmi atau gotong royong, namun tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut, karena setiap orang memiliki sikap yang berbeda-beda, seperti individualisme akibat kesibukan masing-masing warga (Nugraha, 2021). Diperlukan kolaborasi yang lebih intens dan terarah, serta rasionalisasi program yang terukur.

Peran pemerintah tentunya harus dapat ikut andil dalam pengembangan destinasi wisata. Pemerintah dapat mendorong dari segi anggaran untuk pengembangan, pemeliharaan, dan pembinaan kelompok masyarakat sadar wisata (Rahman & Citra, 2018). Hal ini dimungkinkan untuk pengembangan destinasi wisata, baik dari segi sarana prasarana maupun pengelolaan yang lebih profesional. Objek wisata Bukit Sampalan Asri (BSA) telah menjadi bagian dari ikon destinasi wisata di Desa Sukamaju Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.

Dilihat dari segi promosi melalui media, objek wisata Bukit Sampalan Asri (BSA) telah banyak diliput dan direview dalam format berita, artikel, maupun video. Walaupun telah banyak dipublikasikan oleh beberapa media, khususnya media elektronik tetap diperlukan strategi promosi yang efektif oleh pihak pengelola objek wisata Bukit Sampalan Asri (BSA).

Menurut (Manafe et al., 2016) tujuan dari promosi wisata, yakni: (a) mempromosikan lokalitas wisata; (b) meningkatkan dan memantapkan citra wisata; (c) menyebarkan pengetahuan dan produk-produk wisata; serta (d)

membangun dan membina komunikasi yang efektif. Mempromosikan lokalitas wisata telah dilakukan oleh pihak pengelola objek wisata Bukit Sampalan Asri (BSA).

Keindahan dan panorama alam disana juga menjadi memantapkan citra wisata yang tentunya dapat menenangkan para wisatawan yang berkunjung ke objek wisata tersebut. Hanya yang menjadi permasalahan, yakni kurangnya kesadaran dari para wisatawan untuk membuang sampah pada tempatnya.

Aksesibilitas tempat parkir sudah representatif dan akses jalan ke lokasi objek wisata juga mudah dijangkau. Aksesibilitas jalan yang baik tentunya memberi manfaat bagi pengelola objek wisata, diantaranya:

- a. Meningkatkan kunjungan wisatawan.
- b. Meningkatkan perekonomian lokal.
- c. Meningkatkan keselamatan para wisatawan.
- d. Menjaga lingkungan di sekitar objek wisata.

Ketika akses jalan sangat baik untuk dilalui dan ditempuh oleh wisatawan, tentunya memberikan dampak positif untuk promosi secara tidak langsung, serta dapat meningkatkan pendapatan bagi pengelola objek wisata. Aksesibilitas yang baik, tentunya dapat ditempuh oleh semua kalangan untuk dapat beraktivitas di lokasi objek wisata.

Peningkatan jumlah pengunjung yang masuk ke lokasi objek wisata juga dapat memberikan peluang potensi ekonomi baru, seperti restoran dan penginapan. Hal ini tentunya akan memberikan potensi ekonomi yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di wilayah perdesaan.

Aksesibilitas yang baik dapat menurunkan resiko kecelakaan bagi para

pengunjung. Kelestarian lingkungan pula dapat terjaga dikarenakan akses jalan dengan jalur yang sudah ditentukan. Artinya kesesuaian aksesibilitas ke objek wisata akan berdampak pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan.

Pola kerja sama antara semua *stakeholders* akan membentuk bauran dalam peningkatan promosi dan kunjungan wisatawan. Bauran promosi yang terdiri dari periklanan, promosi penjualan, humas dan publisitas, penjualan personal dan pemasaran langsung secara simultan atau berama-sama berpengaruh terhadap keputusan wisatawan (Agusra et al., 2019). Bauran tersebut tentunya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola objek wisata Bukit Sampalan Asri (BSA) untuk peningkatan pengelolaan dan atau manajemen sumber daya yang ada.

2. Implementasi *Community Based Tourism*

Pariwisata Berbasis Masyarakat atau yang dikenal sebagai *Community Based Tourism* bertumpu pada partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan pariwisata. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata Bukit Sampalan Asri (BSA) ditunjukkan dengan adanya pemberdayaan masyarakat sekitar untuk pengelolaan dan pemeliharaan objek wisata.

Tujuan utama dari *community based tourism*, yakni kesejahteraan masyarakat lokal yang berada di sekitar wilayah objek wisata. Pengembangan infrastruktur, pemasaran, penyediaan layanan, dan pengelolaan kegiatan sepenuhnya melibatkan masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan proses inisiasi yang dilakukan masyarakat lokal untuk membuat objek wisata Bukit

Sampalan Asri (BSA). Walaupun demikian, tetap dalam hal Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola objek wisata memerlukan peningkatan kompetensi profesionalisme dalam pengelolaan objek wisata.

Dalam implementasinya, *Community Based Tourism* dapat pula memanfaatkan budaya lokal dalam mempromosikan destinasi baru yang ada di wilayah perdesaan. Bahkan dengan adanya *platform* media sosial hal itu tentunya menjadi peluang sebagai media promosi destinasi wisata.

Peran serta masyarakat dengan paradigma kesatuan yang sama dalam upaya peningkatan kunjungan wisatawan dan tata kelola objek wisata merupakan modal utama kebersamaan untuk pengembangan pariwisata. Asas gotong royong dan sikap positif masyarakat menjadi pondasi dalam pengembangan destinasi wisata. Masyarakat desa yang arif dan toleran terhadap lingkungan hidup, juga menjadi modal dalam upaya pelestarian lingkungan.

Karena pada hakekatnya *Community Based Tourism* juga mengajarkan pola pendidikan lingkungan hidup dan menjelaskan budaya lokal sebagai warisan dari nenek moyang yang dijaga secara turun temurun kepada para wisatawan. Hal ini pula akan berdampak pada pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang ada di kawasan objek wisata Bukit Sampalan Asri (BSA).

Upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat dan pengelola objek wisata Bukit Sampalan Asri (BSA), yakni dengan penanaman tanaman keras di wilayah objek wisata. Hal tersebut merupakan wujud dari upaya pelestarian yang berkelanjutan dan masyarakat desa di

sekitar wilayah objek wisata Bukit Sampalan Asri (BSA) dapat mengambil manfaat dari penghijauan yang dilakukan.

Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh pengelola objek wisata Bukit Sampalan Asri (BSA) dalam upaya pelestarian lingkungan, diantaranya: (a) pengelolaan sampah secara terpadu; (b) penghematan air; (c) konservasi energi; (d) pemberdayaan masyarakat lokal; dan (e) konservasi alam.

Keberlanjutan pariwisata dan keterjagaan lingkungan akan membentuk ekosistem industri pariwisata yang sesuai dengan pola ekonomi hijau. Objek wisata bukan hanya sebagai sarana rekreasi, tetapi dapat pula menjadi pusat edukasi bagi para wisatawan.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Pengelolaan objek wisata Bukit Sampalan Asri (BSA) telah sesuai dengan konsep *community based tourism*, baik dari segi pengelolaan maupun dari segi pengembangan.
2. Pengelolaan objek wisata hendaknya dapat memberikan dampak dalam mengedukasi masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan hidup dan dapat menjadi inisiator dalam pengelolaan sampah, serta konservasi alam yang terintegrasi.
3. Kolaborasi antara seluruh *stakeholders* telah terjalin dengan baik, antara pihak pengelola dengan pemangku kepentingan dalam mengembangkan objek wisata Bukit Sampalan Asri (BSA).

E. Daftar Pustaka

Buku:

- Adiwilaga, R., & Salsabila, N. (2022). Pengembangan Potensi Wisata Edukasi Oleh Lembaga Masyarakat Desa Hutan (Lmdh) Melalui Konsep Penta-Helix Di Kawasan Geowisata Kawah Wayang Desa Sukamanah Kecamatan Pangalengan (Vol. 2). <https://doi.org/https://doi.org/10.54895/dinamika.v2i2.1710>
- Agusra, D., Okta Lussianda, E., Afriyeni, Y., Sekretari, A., Manajemen, D., & Bunda, P. (2019). Strategi promosi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan pada agrowisata tenayan raya pekanbaru provinsi riau. *AKUNTABEL*, 16(1), 2019–2054. <http://journal.feb.unmul.ac.id/index.php/AKUNTABEL>
- Anggrelita, M., Ruspianda, R., Studi, P., Wilayah, P., Kota, D., Teknik, F., Islam, U., Singingi, K., Gatot, I. J., Km, S., Nenas, K., Jake, D., & Singingi, K. K. (2022). Analisis Tata Ruang Desa Bukit Pedusunan Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau (Vol. 57, Issue 1).
- Ani, O., Balai, R., Nilai, P., & Bandung, B. (2013). Potensi Wisata Di Lampung dan Pengembangannya The Potency Of Tourism In Lampung And Its Development. In *Maret* (Vol. 5, Issue 1).
- Asmoro, A. Y., Bachri, T. B., & Detmuliati, A. (2020). Analisis Potensi Wisata Desa Dengan Kerangka 6a Studi Kasus Desa Ngajum, Malang. 18(2). <https://doi.org/10.36275/mws>
- Azizi, A., & Salim, M. A. (2021). Kajian Struktur Ruang Pada Zona Berpotensi Longsor Di Desa Binangun Kecamatan Banyumas Study Of Spatial Structure On Landslide Potential Zone In The Binangun Village Banyumas District. In *Hal* (Vol. 2, Issue 2). <http://jurnalnasional.ump.ac.id?index.php/civeng>
- Bandaso Tandilino, S., Mala Meko, P., Pariwisata, J., & Negeri Kupang Jl Adisucipto Kampus Penfui-Kupang NTT, P. (2020). Penerapan Community Based Tourism Di Desa Wisata Lamalera B Dalam Mendukung Pariwisata Estate Di Nusa Tenggara Timur. *JUPAR - Jurnal Pariwisata*, 3(1), 14–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.32511/tourism.v3i1.649>
- Destiana, R., & Yuningsih, T. (2020). Analisis Peran Stakeholders Dalam Pengembangan Destinasi Pariwisata Halal Di Pulau Penyengat Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 8(2), 132–153. www.kemenpar.go.id,
- Diana, & Budi Setiawan, A. (2021). Evaluasi Penerapan Community Based Tourism (CBT). 4(1), 1044–1065. <https://doi.org/10.15294/efficient.v4i1.42541>
- Diana, P., Suwena, K., Made, N., & Wijaya, S. (2017). Peran Dan Pengembangan Industri Kreatif Dalam Mendukung Pariwisata Di Desa Mas Dan Desa Peliatan, Ubud (Vol. 17, Issue 2). https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/4bf3a02c11f7b5be37a0425406a16151.pdf

- Erlyana, Y. (2018). National Conference of Creative Industry: Sustainable Tourism Industry for Economic Development Analisis Peranan Desain Kemasan Terhadap Brand Identity Dari Sebuah Produk Makanan Lokal Indonesia Dengan Studi Kasus: Produk Oleh-Oleh Khas Betawi “Mpo Romlah.” <https://journal.stieken.ac.id/index.php/penataran/article/view/301>
- Istiyanti, D., & Stasiun Lapang Agro Kreatif Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, F. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengembangan Desa Wisata di Desa Sukawening (Community Empowerment Through Development of Tourist Villages in Sukawening Village). In *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat* Januari (Vol. 2020, Issue 1). <https://jurnal.ipb.ac.id/index.php/pim/article/view/29563>
- Febrian, A. W., & Suresti, Y. (2020). Pengelolaan Wisata Kampung Blekok Sebagai Upaya Peningkatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Community-based Tourism Kabupaten Situbondo. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 9(2), 139–148.
- Kusuma, P. A., & Salindri, Y. A. (2022). Pengembangan Potensi Wisata Di Desa Wisata Sidorejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo. *Journal of Tourism and Economic*, 5(1), 46–62. <https://doi.org/10.36594/jtec.v5i1.139>
- Firliana, R., Kasih Jurusan Sistem Informasi, P., NusantaraPGRI Kediri Jl Achmad Dahlan No, U. K., & Suprpto, A. (2016). Pemanfaatan GIS Untuk Sistem Informasi Pariwisata. <https://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/noe/article/view/245>
- Lindawati, S., & Hendri, M. (2016). Penggunaan Metode Deskriptif Kualitatif Untuk Analisis Strategi Pengembangan Kepariwisata Kota Sibolga Provinsi Sumatera Utara.
- Ibrahim, A., & Nugrahani, H. S. D. (2021). Startegi Implementasi Kebijakan Penanganan Covid 19 untuk Ketahanan Nasional Berbasis Community Development (Konsep Pentahelix) Di Propinsi Maluku Utara. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 500. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2247>
- Luh, N., & Dewi, Y. (2019). Dinamika Collaborative Governance Dalam Studi Kebijakan Publik. *Jurnal Dinamika Sosial*, 3(2), 200–210. <https://journal.undiknas.ac.id>
- Ika, R., Program, S., Manajemen, S., Tinggi, S., Kesuma, I. E., Blitar, N., Masrrip, J., 59 Blitar, N., & Timur, J. (2016). Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.21043/bisnis.v4i1.1687>
- Manafe, J. D., Setyorini, T., Alang, Y. A., Administrasi, J., Politeknik, B., & Kupang, N. (2016). Pemasaran Pariwisata Melalui Strategi Promosi Objek Wisata Alam, Seni Dan Budaya (Studi Kasus di Pulau Rote NTT).

- Mariam, I., Purwinarti, T., Latianingsih, N., & Wartiningsih, E. (2022). Konsep Pentahelix Dan Motivasi Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Meningkatkan Potensi Diri. *Proceeding Seminar Nasional Riset Terapan Administrasi Bisnis & MICE*, 61–66.
- Nirmala Bagus, P. W., Utami Nengah, W., & Paramitha, A. A. I. I. (2020). Digitalisasi Desa dan Potensi Wisata Di Desa Kerta, Kabupaten Gianyar Menuju Pariwisata 4.0. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/jkam.v4i2.11273>
- Nugraha, Y. E. (2021). Sosialisasi Sadar Wisata Sebagai Upaya Pengembangan Desa Wisata Berbasis Masyarakat di Desa Fatukoto (Vol. 2, Issue 1). <https://amptajurnal.ac.id/index.php/JAP>
- Prayogi, D. (2017). Pengembangan Potensi Wisata Kuliner Kota Malang Berbasis Sumber Daya Lokal (Vol. 2).
- Pugra, I. W., Oka, I. M. D., & Suparta, I. K. (2021). Kolaborasi Pentahelix Untuk Pengembangan Desa Timpag Menuju Desa Wisata Berbasis Green Tourism. *Bhakti Persada*, 7(2), 111–120. <https://doi.org/10.31940/bp.v7i2.111-120>
- Rahman, F., & Citra, I. P. A. (2018). Karakteristik Air Terjun Sebagai Potensi Wisata Alam Di Kecamatan Sukasada. *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 6(3). <https://doi.org/10.23887/jjpg.v6i3.20700>
- Rahmat Muhammad, R. A., Novianti, E., & Yustikasari. (2023). Pengembangan Desa Wisata Sindangkasih Dan Desa Wisata Situ Cangkuang Di Kabupaten Garut Melalui Pendekatan Penta Helix. *Media Bina Ilmiah*, 17(6), 1109–1118. <http://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/236>
- Rhosa Fajari, S., Suprapti, A., & Supriyadi Magister Teknik Arsitektur Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Jl Hayam Wuruk Semarang, B. (2014). Pengaruh Aktivitas Penunjang Wisata Terhadap Perubahan Tata Ruang Desa Dan Tata Ruang Rumah Tinggal Studi Kasus: Desa Wisata Bejiharjo, Yogyakarta (The Influence of Tourism Supporting Activity toward The Spatial Changes in Village and houses, Case Study: Desa Wisata Bejiharjo, Yogyakarta): Vol. XII (Issue 2).
- Rusyidi, B., & Fedryansah, M. (2018). Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat. 1(3), 155–165. <http://jurnal.unpad.ac.id/focus/article/view/20490/9358>
- Septiadiani, W. P. (2022). Keselamatan Proyek dan Kenyamanan Lingkungan Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Hidup. In *Universitas Trisakti. Widya Putri Septiadiani*. <https://doi.org/https://doi.org/10.25105/psia.v4i1.16328>
- Singgih Anandito, E., & Bakti Setiawan, dan. (2018). Dampak Ekonomi Penerapan Community Based Tourism Di Desa Wisata Wayang, Kepuhsari, Kecamatan Manyaran

- Kabupaten Wonogiri. In *Jurnal Ilmiah Pariwisata* (Vol. 23, Issue 2).
- Siswanto, A. (2009). Kearifan Lokal Arsitektur Tradisional Sumatera Selatan Bagi Pembangunan Lingkungan Binaan.
- Stefanus Purba, A., & Setiawan, I. (2022). Analisis Konsep Penta Helix dalam Pengembangan Potensi Wisata di Kampung Bekelir Tangerang. *Formosa Journal of Multidisciplinary Research (FJMR)*, 1(4), 919–930. <https://doi.org/10.55927>
- Suroija, N., Asrori, M., Nugroho, S., Bisnis, J. A., Semarang, N., Prof, J., Sh, S., & Semarang, T. (2022). Strategi Pengembangan Ekowisata Dengan Model Pentahelix Pada Karang Jahe Beach Kab Rembang. <https://jurnal.polines.ac.id/index.php/Sentrikom/article/view/3415/107840>
- Syarifah, R., & Rochani, A. (2021). Agus Rochani-109 Pengembangan Desa Wisata Melalui Community Based Tourism In *Jurnal Kajian Ruang* (Vol. 1). <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/kr>
- Triristina, N., Pujiyanti, Y. R., & Muharam, M. M. (2022). Penerapan Community Based Tourism (Cbt) Berbasis Modal Sosial Dalam Pengembangan Objek Wisata Sumber Biru Wonomerto. <https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasah/article/view/14206/7693>
- Ummul, M., Fakultas, F., Dan, E., Sosial, I., & Riau, K. (2022). Pengembangan Wisata Halal Dengan Model Pentahelix. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jel.v13i2.20321>
- Winarno, T., Mas, M., & Said, ud. (2021). Journal of Governance and Local Politics Pengembangan Desa Wisata Adat Using Kemiren Melalui Pendekatan Penta Helix. *Journal of Governance and Local Politics*, 3(2), 137–145. <http://journal.unpacti.ac.id/index.php/jglp/index>
- Yulianto, Y., Meilinda, S. D., Fahmi, T., Hidayati, D. A., & Inayah, A. (2022). Penerapan Community Based Tourism (Cbt) Di Desa Merak Belantung Kabupaten Lampung Selatan Dalam Mewujudkan Desa Ekowisata. *Jurnal Abdi Insani*, 9(1), 9–19. <https://doi.org/10.29303/abdiinsani.v9i1.469>
- Zakaria, F., & Suprihardjo, R. D. (2014). Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. *Jurnal Teknik POMITS*, 2(2), 1–5. <https://doi.org/10.12962/j23373539.v3i2.7292>
- Zamhari, A. (2017). Nilai Keselarasan Pada Pola Tata Ruang Desa Pelang Kenidai Kecamatan Dempo Tengah Kota Pagaralam Sebagai Sumber Pembelajaran Sejarah (Vol. 1, Issue 1). <http://id.m.wikipedia.org>